

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM MENGATASI BANJIR DAN ROB TAHUN 2013**

Oleh:  
Risiandi

**Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405  
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## **Abstract**

From time to time Semarang experienced flooding and sea water overflowing. This is because in the north which also called Kota Bawah is located lower than the sea. Implementation Policy of government has tried various policies in addressing the flood and sea water overflowing through the polder system, elevating the road and installing drainage. But when it viewed from the conditions in the field that flooding and overflowing of sea water are increasingly venturing into the city, it can be said until now the problem cannot be resolved.

The purpose of this study was to determine the efforts of Semarang City Government in the implementation policies and know the obstacles faced in addressing flood sea water overflowing. This research was conducted at the Department of Water Resources and Energy and Mineral Resources of Semarang. This study uses qualitative and descriptive type of analysis, while the method of data collection was conducted through interviews and observation.

Based on the analysis of implementation policy by Donald S. Van meter and Carl E. Van Horn who has six indicators, namely; standards and objectives, resources, inter-organizational relationships, implementing characteristics, socio-economic and political conditions, implementers disposition yet also shows the effective and efficient results. The results of this study indicate that implementation policy of Semarang in addressing the flood and sea water overflow according to the Regional Regulation No. 14 Year 2011 about Spatial Planning of Semarang Year 2011-2031 not optimal due to the flood still happened in some parts of the city of Semarang like in Johar Market area of Semarang is always experienced flooding when the rainy season and suffered sea water overflows when the rising tide inundation that occurred in most of the area.

Referring to the results of the study suggested implementation policy of Semarang Government to control the flood and sea water overflow in an integrated and sustainable thus produce a more optimal achievement. Efforts should be made by the Government such as constructing of the addition of water pumps, constructing of the addition of retention ponds and enhance cooperation with Japan International Corporate Agencies relevant parties to resolve the flood in the city of Semarang.

Keywords: Implementation Policy; Floods; Sea water overflow

## A. PENDAHULUAN

### A.1 Latar Belakang Masalah

Kota Semarang terdiri dari daratan tinggi dan perbukitan di bagian selatan yang sering disebut dengan Semarang atas dan daratan rendah dibagian utara (pantai) yang sering disebut dengan Semarang bawah. Kondisi tersebut menyebabkan wilayah Kota Semarang memiliki potensi bencana yang cukup tinggi. Kota Semarang setiap tahunnya, khusus pada musim hujan selalu dihadapkan pada permasalahan banjir dan rob. Namun diakui bahwa banjir dan rob merupakan bencana yang paling sering melanda Kota Semarang bagian bawah meliputi Kecamatan Semarang Utara, Semarang Timur, Genuk. Kota Semarang memiliki predikat sebagai kota banjir, walau berbagai upaya telah ditempuh, namun banjir dan rob masih belum teratasi sampai saat ini.

Kota Semarang menghadapi permasalahan berupa banjir, baik banjir musiman yang datang setiap musim hujan, maupun banjir harian akibat rob. Banjir seakan sudah menyatu dengan Kota Semarang, sehingga mendapat julukan “Kota Banjir”.<sup>1</sup>

Banjir dan rob yang menerjang kawasan Semarang dan sekitarnya, terutama kawasan pesisir, tentu bukan hal yang asing bagi kita. Sudah sejak dari jaman penjajahan Belanda usaha pengendalian terhadap banjir dan rob dilakukan. Mulai dari meninggikan badan jalan hingga pengerukan sungai. Namun berganti tahun dan berganti juga kepemimpinan tetapi belum ada perubahan yang berarti terhadap kondisi tersebut.

Rob merupakan fenomena yang selalu terjadi di Kota Semarang. Dari tahun ke tahun, frekuensi kejadian rob semakin meningkat dan cenderung semakin meluas. Hal ini diduga karena tanah di Kota Semarang terutama di bagian utara mengalami penurunan tanah sekitar 7 hingga 13 centimeter setiap tahunnya. Hal itu berdasarkan penelitian dari *German Intitute for Geosciences and Natural Resources* bekerjasama dengan Bappeda Kota Semarang melalui Proyek *Mitigation of Georisks*.

Kota Semarang memang identik dengan kata banjir dan rob karena memang letaknya yang lebih rendah dari laut. Pemerintah Kota Semarang telah mengupayakan berbagai kebijakan dalam mengatasi masalah banjir dan rob di Kota Semarang melalui sistem polder, peninggian jalan, dan pembuatan drainase, tetapi jika dilihat dari kondisi lapangan bahwa banjir dan rob semakin lama semakin merambah ke arah kota, maka dapat dikatakan bahwa sampai saat ini masalah tersebut belum dapat teratasi.

Banjir dan rob sepanjang tahun masih menjadi tema yang “ngangkat” untuk dibicarakan dalam mengupas perkembangan Kota Semarang.

Banjir dan rob di Kota Semarang mengakibatkan berbagai permasalahan bagi penduduk di permukiman wilayah pesisir terutama di daerah Semarang Utara, antara lain kondisi lingkungan kurang sehat, gangguan kesehatan, kerusakan fasilitas publik, kerugian harta benda, dan gangguan aktivitas kerja. Penanggulangan banjir dan rob dilakukan dalam skala regional, lokal, atau bahkan spesifik pada satu unit bangunan saja. Sebagai contoh, rumah-rumah penduduk di sekitar Pelabuhan Tanjung Mas yang selalu menjadi langganan banjir, mengantisipasi penurunan muka tanah dan banjir dengan cara menimbun halaman dan membuat tanggul-tanggul sederhana. Bahkan pengelola Stasiun Tawang Semarang pun telah menaikkan pelataran parkirnya untuk mencegah terendahnya kendaraan pada saat terjadinya rob. Beberapa kondisi yang menyebabkan permasalahan banjir dan rob di Kota Semarang adalah:

#### Banjir

1. Curah hujan yang tinggi.
2. Perencanaan sistem pengendalian banjir yang kurang tepat.
3. Kawasan kumuh di sepanjang drainase.

#### Rob

1. Kenaikan permukaan air laut akibat pemanasan global.
2. Penurunan permukaan tanah di kawasan pantai akibat penggunaan air tanah yang berlebihan.
3. Pengaruh air pasang.

Banjir dan rob di kota Semarang telah menjadi ikon kota yang dulu dikenal sebagai kota perjuangan. Berbagai cara telah ditempuh pemerintah Kota Semarang untuk menangani masalah banjir dan rob yang sangat mengganggu namun sepertinya permasalahan tak kunjung usai. Sukawi Sutarip (Walikota Semarang tahun 2008) bahkan mengatakan rob (air laut yang merembes ke darat) yang terjadi di Kota Semarang penanganannya sudah menjadi masalah nasional karena sudah menjadi fenomena alam.

Pandangan masyarakat banyak mengatakan bahwa penanganan banjir dan rob di Kota Semarang belum membawa hasil sampai saat ini karena banjir di daerah langganan masih terus terjadi, bahkan banjir mulai merambah ke daerah – daerah yang dulunya tidak atau jarang terjamah banjir.

## B. Perumusan Masalah

<sup>1</sup> Suripin, *Sistem Drainase Perkotaan Yang Berkelanjutan*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004, hlm. 337

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanana implementasi kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi banjir dan rob?
2. Hambatan apa yang dialami oleh Pemerintah Kota Semarang dalam implementasi kebijakan mengatasi banjir dan rob?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi banjir dan rob.
2. Untuk mengetahui hambatan apa yang dialami oleh Pemerintah Kota Semarang dalam implementasi kebijakan mengatasi banjir dan rob.

### D. Kerangka Pemikiran

#### D.1 Kebijakan Publik

Riant Nugroho D. memandang bahwa kebijakan publik yang terbaik adalah kebijakan yang mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing – masing dan bukannya semakin menjerumuskan ke dalam pola ketergantungan.<sup>2</sup>

Sifat Kebijakan publik sebagai arah tindakan dapat dipahami secara lebih baik, apabila konsep ini dirinci menjadi beberapa kategori, kategori-kategori tersebut antara lain adalah<sup>3</sup> : (1) Tuntutan kebijakan adalah tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh aktor-aktor swasta atau pemerintah, ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah atau sistem politik, (2) Keputusan kebijakan didefinisikan sebagai keputusan-keputusan yang dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintah yang mengesahkan atau memberi arah dan substansi kepada tindakan-tindakan kebijakan publik, (3) Pernyataan kebijakan adalah pernyataan - pernyataan resmi atau artikulasi - artikulasi kebijakan publik. Seperti undang-undang legislatif, (4) Hasil-hasil kebijakan lebih merujuk ke manifestasi nyata dari kebijakan publik, hal-hal yang sebenarnya dilakukan menurut keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan, (5) Dampak kebijakan lebih merujuk pada akibat - akibatnya bagi masyarakat, baik yang diinginkan atau tidak diinginkan yang

berasal dari tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah.

Pendapat lain menunjukkan bahwa, kebijakan publik merupakan hasil rumusan atas penyaringan dan pemilihan terhadap berbagai tuntutan dan kepentingan-kepentingan para pelaku politik maupun publik yang disampaikan kepada pemerintah. Hal tersebut bergayutan dengan tugas pemerintah, yakni menyerap semua tuntutan dan kepentingan para pelaku politik maupun publik, menghimpun sumberdaya para pelaku, dan memenuhi tuntutan serta kepentingan tersebut. Akan tetapi karena tidak semua tuntutan dapat dipenuhi dalam waktu bersamaan, terutama karena jumlah sumberdaya yang lebih sedikit dari pada tuntutan tersebut, pemerintah selalu melakukan penyaringan dan pemilihan tuntutan dan kepentingan. Ada tuntutan yang dapat dipenuhi segera, tapi tidak sedikit yang harus ditunda atau disingkirkan. Hasil penyaringan dan pemilihan inilah yang dirumuskan sebagai kebijakan publik.<sup>4</sup>

James E. Anderson dalam bukunya “*public policy making*” menyatakan bahwa: kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Konsep kebijakan ini menitik beratkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud. Dan hal inilah yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan diantara beberapa alternatif yang ada.<sup>5</sup> Menurut Anderson implikasi dari pengertian kebijakan negara tersebut adalah : (1) Bahwa kebijakan negara itu selalu punya tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan, (2) Bahwa kebijakan itu berisi tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah, (3) Bahwa kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, (4) Bahwa kebijakan negara itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa tindakan pemerintah mengenai masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah dalam melakukan sesuai.

#### D.2 Implementasi Kebijakan

Menurut Tangkilisan implementasi kebijakan merupakan aktivitas organisasi untuk

<sup>2</sup> Riant Nugroho D, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2003, hlm. 50

<sup>3</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2007, hlm. 57

<sup>4</sup> Randy R Wirhatnolo dan Riant Nugroho, *Manajemen Pemberdayaan*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009, hlm. 131

<sup>5</sup> Agustino Leo, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: CV. Alfabeta, 2006, hlm. 7-8

merealisasikan tujuan – tujuan kebijakan organisasi menjadi hasil yang bisa dilihat.<sup>6</sup>

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab yang dimaksud dengan proses implementasi adalah tindakan – tindakan yang dilakukan baik oleh individu – individu atau pejabat – pejabat pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.<sup>7</sup>

Sedangkan Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Wahab menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan: memahami apa yang nyata terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kegiatan – kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman – pedoman kebijakan negara.<sup>8</sup>

Berdasarkan pendapat kedua ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan – badan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program melainkan pula menyangkut kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak yang diharapkan.<sup>9</sup>

Adapun dalam implementasi kebijakan yang menjadi salah satu kelemahan dasar yang dimiliki para implementer kebijakan publik adalah persepsi bahwa implementasi adalah bagian terpisahkan dari perencanaan kebijakan. Padahal kesuksesan implementasi sangat dipengaruhi oleh bagaimana sebuah desain kebijakan mampu merumuskan secara komprehensif aspek pelaksanaan sekaligus metode evaluasi yang akan dilaksanakan. Ini penting diketahui oleh pembuat keputusan dan juga pelaksana kebijakan karena adanya tantangan yang serius di lapangan.<sup>10</sup>

Dalam pandangan teori George C. Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat indikator yang saling berhubungan yaitu, (1) Komunikasi: Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran agar menghindari penyimpangan dalam implementasi kebijakan, (2) Sumberdaya: Merupakan

faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif, (3) Disposisi: Watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis, (4) Struktur Kebijakan: Organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.<sup>11</sup>

Menurut teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn ada enam indikator yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan yaitu, (1) Standar dan sasaran: Kebijakan harus jelas dan terstruktur sehingga dapat direalisasikan, (2) Sumberdaya: Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya manusia maupun sumberdaya non manusia, (3) Hubungan antar organisasi: Implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain demi keberhasilan program tersebut, (4) Karakteristik agen pelaksana: Mencakup struktur birokrasi dan pola – pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, (5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi: Merupakan variabel yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, (6) Disposisi Implementor: Respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan dan pemahaman terhadap kebijakan.<sup>12</sup>

### **E. Operasionalisasi Konsep**

Dalam implementasi kebijakan Pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi banjir dan rob dapat dilihat dari berbagai sudut, sebagai berikut:

1. Segala upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi banjir dan rob melalui pelaksanaan kebijakan dan program-programnya.
2. Upaya Pemerintah dalam mengatasi hambatan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan mengatasi banjir dan rob.

### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian sangat berperan dalam menentukan berhasil atau tidaknya kegiatan penelitian sebagai tuntutan berpikir yang sistematis gar dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Keberadaan metode merupakan salah satu syarat diakuinya sesuatu menjadi ilmu pengetahuan, disamping syarat-syarat yang lain yakni mempunyai objek, sudut pandang terhadap objek metode serta hasil-hasil pandangannya merupakan suatu kesatuan utuh dan bulat atau sistematis.

#### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif.

<sup>6</sup> Hesel Nogi Tangkilisan, *Kebijakan Publik yang Membumi*, Yogyakarta: YPAP, 2003, hlm. 13

<sup>7</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formula ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002, hlm. 65

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 65

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 65

<sup>10</sup> Abdulkahar Badjuri dan Teguh Yuwono, *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*, Semarang: Undip, 2003, hlm. 111

<sup>11</sup> AG, Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 90-92

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 99-101

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan adanya suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data-data berdasarkan keadaan yang ada.

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Semarang.

## **3. Sumber Data**

- a. Data Primer, sumber data langsung dengan menggunakan wawancara kepada narasumber yang dapat dipercaya dalam penelitian. Pencatatan data primer merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya.
- b. Data Sekunder, sumber data diperoleh secara tidak langsung dari studi pustaka berupa literatur buku, jurnal, dan media cetak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara mengadakan percakapan secara langsung melalui lisan terhadap pihak yang berkaitan langsung dalam penelitian, percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang terwawancara yang memberikan jawaban atau pertanyaan yang telah diajukan.
- b. Observasi adalah pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala sosial dan kegiatan yang ada untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan sasaran. Observasi dilakukan pada obyek penelitian dimana peristiwa tersebut sedang terjadi.
- c. Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara menggunakan instrumen-instrumen yang berupa dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang menunjang penelitian. Data dokumentasi dapat berupa data di lapangan.

## **5. Instrumen Penelitian**

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri menggunakan alat bantu seperti pedoman wawancara, daftar pertanyaan wawancara, dokumen tertulis, catatan dan perekam suara. Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah *indepth interview* sehingga peneliti tidak hanya berdasarkan pertanyaan saja tetapi bisa

melakukan wawancara mendalam sehingga mempermudah proses penelitian dalam memperoleh data yang dibutuhkan.

## **G. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Pembuatan Kolam Penampungan Air**

Pemerintah Kota Semarang membuat terobosan baru untuk mengatasi masalah banjir yang sering terjadi. Yakni membuat kolam retensi atau kolam penampungan air yang dapat menyaring sampah berupa, tanah dan pasir serta batu yang selalu menyumbat gorong-gorong maupun drainase hingga menyebabkan banjir.

Kolam retensi ini nantinya akan menampung seluruh air hujan dari atas bukit. Sedangkan tanah atau lumpur bercampur batu yang tergerus dari bukit akan tertampung di kolam ini. Jika kolam penampungan ini sudah berfungsi, mudah-mudahan tidak akan terjadi banjir lagi. Nantinya air dari kolam ini akan diteruskan melalui pipa dan dilakukan pembenahan jalur airnya ke drainase. Lalu disalurkan langsung ke parit di tepi jalan di bawah. Jika air yang turun ke bawah, tentu tidak akan banjir seperti selama ini. Setelah selesai penggalian akan dipasang pipa yang memadai agar air tidak meluber dari kolam retensi ini. Kemudian akan dipasang pagar keliling kolam dan juga akan dipasang papan pengumuman sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Kolam retensi ini akan bisa menampung ratusan ribu kubik air dan tanah yang tergerus hujan. Dan diperkirakan kolam ini akan penuh dalam waktu yang cukup lama. Bila kolam ini sudah penuh dengan tanah maka melakukan penggalian kembali dan membersihkannya, sehingga laju air akan lancar. Kolam retensi adalah sebuah lubang hasil pengerukan yang digunakan sebagai tempat penampungan air sementara. Kolam retensi merupakan salah satu penanggulangan banjir yang populer sekarang. Namun terdapat sebuah kendala dalam penerapannya yaitu lahan yang akan digunakan. Kota-kota besar yang sangat memerlukan kolam retensi selalu terbentur dengan permasalahan lahan ini. Hal ini membuat pemerintah harus benar-benar memperhatikan ketepatan lokasi perencanaan, agar kolam retensi yang sedikit tersebut dapat memaksimalkan fungsinya guna mendapat manfaat yang besar.

### **2. Pengembangan Stasiun Pompa Air pada Kawasan Terbangun**

Hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam strategi pengendalian banjir Pemerintah Kota Semarang adalah pemasangan pompa-pompa air terutama di Semarang bagian utara yang lokasinya berupa dataran rendah dengan ketinggian di bawah permukaan laut. Bila volume air dari hulu Semarang

sedang tinggi dan melebihi kapasitas tampung sungai dan saluran air yang ada, terjadilah genangan-genangan yang mengganggu kehidupan warga Semarang. Satu-satunya cara untuk mengeringkan genangan air adalah dengan memompa air yang menggenang dan mengalirkannya ke saluran air yang mengalir langsung ke laut.

### **3. Pengerukan Saluran Drainase Hingga Sampai Muara Sungai**

Saluran drainase adalah saluran-saluran berbentuk persegi atau trapesium yang berfungsi mengalirkan/menyalurkan air limbah dan air hujan ke tempat penampungannya. Salah satu faktor utama penyebab banjir di Kota Semarang adalah buruknya penanganan masalah drainase Kota, khususnya saluran permukaan. Banyak saluran-saluran drainase di Kota Semarang yang tidak berfungsi secara maksimal. Bahkan saluran drainase yang awalnya difungsikan untuk menanggulangi banjir inilah yang menjadi salah satu penyebab banjir. Faktor-faktor yang menyebabkan banjir, antara lain: (1) Elevasi permukaan dan saluran drainase yang tidak sesuai, permukaan saluran lebih tinggi dari permukaan jalan sehingga proses pengaliran pun berlawanan dari rencana, (2) Arah aliran saluran drainase tidak sesuai dengan arah aliran sungai, (3) Terjadinya ketidaksinambungan jaringan antara drainase lama dan drainase baru, (4) Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, karena sampah-sampah tersebutlah yang membuat saluran drainase tersumbat sehingga membuat air-air di dalam saluran meluap ke permukaan jalan, (5) Kerusakan saluran yang disebabkan penggalian-penggalian pipa.

Sedangkan upaya-upaya yang harus dilakukan dalam pembenahan saluran drainase antara lain, yaitu: (1) Mengubah saluran terbuka menjadi saluran tertutup, (2) Menambah kedalaman saluran drainase, (3) Membuat peraturan yang tegas tentang penggalian di saluran drainase.

### **4. Pembuatan Tanggul Pantai**

Untuk mengatasi masalah rob di Kota Semarang, satu-satunya cara hanya dengan membuat tanggul pantai untuk membendung air laut agar tak masuk ke pemukiman. Salah satu tantangan besar yang dihadapi Pemerintah Kota Semarang adalah banjir yang disebabkan oleh gelombang pasang laut yang sering disebut sebagai banjir rob. Pemerintah Kota Semarang telah membangun tanggul rob di bagian Pantai Utara Semarang pada tahun 2008 dan 2009 untuk melindungi warga dari banjir rob.

### **5. Peningkatan Rekayasa Teknis pada Lokasi Tertentu**

Dalam mencegah atau mengurangi banyak air yang meluap ke daratan akibat pasangannya air

laut, salah satu upaya inovasi yang dapat kita lakukan yaitu pembuatan Tembok Penahan pasangannya air laut (*Levee*). Melalui sistem ini kita dapat mengantisipasi banyaknya volume air yang dapat meluap akibat pasangannya air laut. Dengan volume air luapan yang tertahan melalui *Levee*, maka akan mengurangi atau memperkecil peluang terjadinya banjir rob di Semarang.

### **6. Penghijauan Kawasan Pantai**

Penanganan rob yang selama ini belum tersentuh adalah penanaman *mangrove* di kawasan pantai. Untuk mengendalikan rob di Kota Semarang Pemerintah melakukan penghijauan di kawasan pantai Semarang. Kawasan pantai yang sekarang lebih banyak direklamasi harus dihijaukan kembali dengan penanaman *mangrove*. Kegiatan penghijauan pesisir merupakan bagian dari Program Konservasi Wilayah Pesisir di Kota Semarang. Penghijauan kawasan pantai menjadi salah satu alternatif mencegah rob agar tidak makin meluas di kawasan Kota Semarang.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi banjir dan rob maka dapat ditarik kesimpulan sebagai yaitu Upaya Pemerintah Kota Semarang dalam mengendalikan banjir dengan melakukan pemasangan pompa-pompa air terutama di Semarang bagian utara yang lokasinya berupa dataran rendah dengan ketinggian di bawah permukaan laut belum sepenuhnya optimal. Bila volume air dari hulu Semarang sedang tinggi dan melebihi kapasitas tampung sungai dan saluran air yang ada, terjadilah genangan-genangan yang mengganggu kehidupan warga Semarang. Banjir di Kota Semarang dikarenakan buruknya penanganan masalah drainase Kota, khususnya saluran permukaan. Banyak saluran-saluran drainase di Kota Semarang yang tidak berfungsi secara maksimal. Bahkan saluran drainase yang awalnya difungsikan untuk menanggulangi banjir inilah yang menjadi salah satu penyebab banjir dikarenakan kerusakan saluran drainase dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan yang membuat saluran drainase menjadi tersumbat sehingga membuat air-air di dalam saluran meluap ke permukaan jalan. Dan terbatasnya sumberdaya manusia, dana dan sarana dalam mengatasi banjir dan rob di Kota Semarang.

### **Saran**

Untuk mendapatkan suatu sistem pengendalian banjir yang optimal, pengendalian dan perbaikan sungai dan drainase harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan sedangkan untuk sistem

kolam retensi dan polder yang sudah ada perlu dikaji kembali kondisinya supaya dapat diketahui sistem penanggulangannya. Mengingat bahwa di kota Semarang ini terjadi penurunan tanah yang sangat aktif, sistem polder kurang berhasil serta pengaruh rob semakin meningkat. Maka salah satu sistem pengendalian banjir dilakukan dengan pembuatan Tanggul Lepas Pantai yang dilengkapi dengan sarana lainnya yang diperlukan (pintu, pompa, perkuatan tebing). Dan perlu ditingkatkannya sinergitas Pemerintah Kota Semarang dengan *stakeholders* untuk bersama-sama mengatasi banjir dan rob di Kota Semarang.

#### **Daftar Pustaka**

- Badjuri, Abdulkahar dan Teguh Yuwono. (2003). *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Leo, Agustino. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Meleong, Lexy J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nogi, Hesel Tangkilisan. (2003). *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: YPAP.
- Nugroho, Riant D. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Subarsono, AG. (2006). *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suripin. (2004). *Sistem Drainase Perkotaan Yang Berkelanjutan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Wahab, Solichin A. (2002). *Analisis Kebijakan dari Formula ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wirhatnolo, Randy R dan Riant Nugroho. (2009). *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.